

ALASAN PEMULIHAN HUBUNGAN BILATERAL

TURKI DAN ISRAEL DI ERA PRESIDEN ERDOGAN TAHUN 2016

Sherley Mutiara Mirchu Sawlani

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: sherley.mutiara.2014@fisipol.umy.ac.id

ABSTRACT

This paper aims to explain the rational reasons for the Turkish Government under President Erdogan in restoring bilateral relations with Israel in 2016. The decision to restore relations is certainly through a process of profit and loss calculation for Turkey, especially in the military, political and economic fields. Turkey's relationship with Israel cannot be separated from the issue of Palestine and also close economic and military cooperation. This paper will explain the rational considerations of the Turkish Government under Erdogan as a Rational Actor in restoring bilateral relations with Israel.

Keywords: President Erdogan, Relationship Restoration, Rational Actors, Profit and Loss Calculations

Pendahuluan

Turki merupakan sebuah negara berdaulat yang juga kelanjutan dari Kekhalifahan Turki Utsmani, sebuah Kekhalifahan Islam terakhir yang diakui dunia. Turki Utsmani memiliki masa kejayaan pada rentang waktu 923-1342 Hijriyah/1517-1922 Masehi, ketika itu Turki Utsmani berhasil menguasai wilayah Asia Kecil, Semenanjung Balkan, pulau-pulau di Laut Tengah, Mesir, Syam, Maroko, Tunisia, Aljazair, Libya, dan beberapa daerah lain yang membentang dari

Teluk Persia dan Sungai Dajla di Timur sampai ke Samudera Atlantik di Barat, dari Asia kecil dan Laut Tengah di Utara sampai Khatulistiwa dan Laut Arab di sebelah Selatan (Mughni S. A., 1997, hal. 54-66). Namun kejayaan itu berakhir ketika Turki Ustmani yang saat itu dipimpin oleh Sultan Abdul Hamid II memutuskan untuk Turki Ustmani ikut turun dalam perang dunia I dan bergabung dengan Jerman, Austro-Hungaria, dan Bulgaria. Pada Perang Dunia I tersebut Turki berada dipihak yang kalah. Akibat kekalahan tersebut Turki Utsmani banyak kehilangan wilayah kekuasaannya, baik memerdekakan diri maupun jatuh ke tangan pihak Sekutu.

Pada tahun 1922 terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Jendral perang Turki Utsmani yaitu Mustafa Kemal Pasha yang mendesak Sultan untuk mundur dan sistem negara diganti menjadi Republik. Di pihak lain, kubu fundamentalis islam meminta supaya Sultan diganti, karena Sultan tidak lagi memerintah dengan hukum Tuhan. Pada tanggal 1 November 1922, Majelis Nasional di Ankara mengeluarkan undang-undang pemisahan antara Khalifah dan Kesultanan. Sehingga Sultan tidak lagi diakui sebagai Khalifah dan ditunjuklah ulama yang memiliki ilmu dan pengetahuan tentang islam sebagai Khalifah. Tanggal 23 Juli 1923 merupakan hari berakhirnya Kekhalifahan Turki Ustmani ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian Lausine, yaitu penentuan letak batas Republik Turki dan Kesultanan tidak lagi dianggap sebagai pemerintah (Amalsyah, 2014, hal. 21).

Mustafa Kemal Pasha menjadi presiden Republik Turki yang pertama, ia berusaha melakukan *westernisasi* pada Turki dan membuat Turki menjadi Sekuler seperti bangsa Barat. Lewat paradigma ini Mustafa Kemal Pasha melakukan reformasi kultural secara paksa dan radikal contohnya seperti, pada tahun 1924 Khalifah Islamiah resmi dibubarkan oleh pemerintah Republik Turki. Pada 20 November 1925, dikeluarkan kebijakan pelarangan pakaian tradisional Turki yang bernuansa Islam, kalender Hijriah juga diganti dengan kalender Gregorian. Februari 1926, Majelis Nasional Turki mengadopsi hukum perdata Swiss untuk menggantikan hukum yang dibuat pada masa Turki Ustmani. Lalu pada 19 Agustus 1928, Majelis Nasional mengeluarkan undang-undang penetapan huruf abjad Latin menggantikan huruf abjad Arab. Kemudian bagi umat islam dilarang menggunakan jilbab dan simbol islam lainnya, sehingga umat islam dibatasi dalam menjalankan ritual agamanya.

Setelah wafatnya Mustafa Kemal Pasha pada 10 November 1938, jabatan Presiden Turki digantikan oleh Ismet Inonu sampai tahun 1950. Inonu merupakan pengikut setia dari Mustafa

Kemal Pasha, sekaligus pelanjut dari ideologi sekulerisme di Turki. Presiden–presiden Turki setelah Mustafa Kemal Pasha dan Ismet Inonu tetap melanjutkan sekulerisme di Turki, kebijakan sekulerisme tersebut dapat terus berjalan karena partai *Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)* yang didirikan oleh Mustafa Kemal Pasha pada tanggal 7 September 1919 selalu berhasil memenangkan Pemilihan Umum. Baru pada tahun 1995 CHP berhasil dikalahkan dalam pemilu oleh *Refah Partisi*, sebuah partai politik yang berhaluan islam. Namun CHP yang didukung oleh militer Turki merasa tidak terima maka pada tahun 1997 Necmetin Erbakan yang menjabat sebagai Perdana Menteri dilengserkan dan setahun kemudian *Refah Partisi* dibubarkan.

Para politisi kalangan islam dari *Refah Partisi* membentuk *Partai Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP)* pada tanggal 14 Agustus 2001, termasuk didalamnya Recep Tayyip Erdogan. Partai AKP sebagai partai oposisi berhasil memenangkan pemilu pada tahun 2002. AKP pun menjadi partai yang menguasai pemerintahan dengan perolehan kursi sebanyak 367 kursi dari total 550 kursi di Parlemen Turki. AKP kembali memenangkan pemilihan umum pada tahun 2007 dan Erdogan terpilih sebagai Perdana Menternya serta menguasai mayoritas kursi di Parlemen yakni 341 kursi dari 550 kursi (VOA INDONESIA, 2007). Turki dibawah kepemimpinan Erdogan mengalami kemajuan pesat yang membuat Turki kembali disegani sebagai salah satu negara terkuat di Eropa. Hal tersebut membuat nama Erdogan melambung dan masuk sebagai salah satu pemimpin terbaik dunia saat ini. Pada pemilihan umum 2011, AKP kembali mendapat mandat dari masyarakat dan memenangkan pemilu kembali serta Erdogan menjabat sebagai Perdana Menteri pada periode berikutnya. Pada tahun 2014, ketika masa jabatannya sebagai Perdana Menteri berakhir Erdogan mencalonkan diri sebagai Presiden Turki yang didukung oleh AKP. Pada pemilihan umum 2014 Erdogan berhasil terpilih sebagai Presiden Turki melalui pemilihan umum.

Erdogan berhasil merebut hati rakyat Turki dengan progam-progam ekonomi serta progam Islamisasi yang mengesankan. Progam Islamisasi tersebut di keluarkan melalui kebijakan-kebijakan politik yang dibawa damai oleh Erdogan sehingga ia dikagumi oleh masyarakat Turki tetapi dibenci oleh kaum sekuler ekstrim. Hingga kini Erdogan terus konsisten dalam menjalankan progam-progam islamisasi, contohnya seperti membebaskan pakaian jilbab diseluruh sektor di Turki, melarang minuman keras atau alkohol, dan lain sebagainya (Marzaman, 2011).

Sedangkan dalam kebijakan luar negeri, Erdogan juga mendukung perjuangan-perjuangan umat islam dunia yang sedang mengalami krisis ataupun konflik. Salah satunya yaitu Palestina, Erdogan sangat vokal dalam menyuarakan dukungan terhadap Rakyat Palestina dan kerap kali mengkritisi kebijakan Israel atas Palestina. Contohnya, pada tahun 2014 Erdogan dalam sebuah rapat umum ketika perang di jalur Gaza tengah berkecamuk, Erdogan melontarkan kritik terhadap Israel :

“(Israel) tidak memiliki hati nurani, tidak ada kehormatan, tidak ada kebanggaan. Mereka yang mengutuk Hitler siang dan malam telah melampaui kekejaman Hitler” (Sari, 2015).

Meskipun dalam pembuatan kebijakan dalam negeri dan luar negeri pemerintahan Erdogan sangat pro terhadap islam, tetapi pada tahun 2016 Erdogan bersikap ambigu dalam sebuah kebijakan luar negeri. Kebijakan tersebut yaitu pemulihan hubungan bilateral dengan Negara Israel, padahal Israel merupakan negara yang menduduki tanah Bangsa Palestina sehingga kebijakan tersebut bertolak belakang dengan dukungan Erdogan terhadap perjuangan Rakyat Palestina.

Turki dan Israel sendiri sebenarnya telah menjalin hubungan diplomasi sejak tahun 1949, Turki berbeda dengan negara-negara mayoritas muslim lainnya yang menolak kehadiran Negara Israel di Tanah Palestina, sedangkan Turki langsung mengakui kedaulatan Israel. Hubungan Turki dan Israel dimasa pemerintahan Erdogan sempat mengalami pembekuan pada tahun 2010, Turki membekukan hubungan diplomatik dengan Israel dikarenakan Militer Israel melakukan penyerangan terhadap kapal MV Mavi Marmara yang mengangkut bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza yg menewaskan 10 aktivis berkewarganegaraan Turki. Turki meminta pemerintah Israel membayar ganti rugi kepada keluarga 10 aktivis tersebut dan wajib meminta maaf secara terbuka atas insiden penyerangan tersebut (Mohamad, 2016). Namun pemerintah Israel menolak untuk meminta maaf dan membayar ganti rugi terhadap korban dari insiden tersebut, sehingga Erdogan membekukan hubungan bilateral Turki dan Israel.

Setelah mengalami pembekuan selama kurang lebih lima tahun, pada tahun 2015 Turki dan Israel menjajaki normalisasi hubungan bilateral. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden

Erdogan dalam naskah pidato tertulis disurat kabar Turki Kantor Berita AFP, seperti yang dilansir dari merdeka.com:

“Israel membutuhkan negara seperti Turki di kawasan, dan kami pun harus mengakui bahwa Bangsa Turki membutuhkan Israel. Inilah kenyataannya. Jika bisa dicapai langkah yang saling menguntungkan, maka normalisasi bilateral akan mengikuti secara alamiah” (Mohamad, 2016).

Namun pada pertemuan awal Desember 2015, Turki menetapkan syarat-syarat sebelum menormalisasi hubungan bilateral dengan Israel. Syarat-syarat tersebut yaitu, *pertama*, Israel harus membuka blokade terhadap akses darat, laut, dan udara terhadap Penduduk Palestina di Jalur Gaza. *Kedua*, Israel harus meminta maaf atas insiden penyerangan kapal Mavi Marmara pada tahun 2010 serta membayar kompensasi sebesar 20 juta dolar untuk korban luka dan keluarga korban yang tewas. Israel menyanggupi dua syarat tersebut, pengumuman resmi terkait perbaikan hubungan tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan Perdana Menteri Turki Binali Yildirim pada tanggal 27 Juni 2016 (KOMPAS, 2016). Setelah pemulihan hubungan Erdogan mengutus Kemal Okem yang merupakan seorang diplomat senior Turki untuk mengisi posisi Duta Besar Turki untuk Israel, sedangkan Israel mengutus Eitan Naeh sebagai Duta Besar Israel untuk Turki (Hutapea, 2016). Keputusan Presiden Erdogan dalam pemulihan hubungan bilateral Turki terhadap Israel menjadi hal yang menarik untuk diteliti, terutama untuk mengetahui alasan-alasan rasional dari pemerintah Turki dibalik pemulihan hubungan dengan Israel.

Model Aktor Rasional Graham T. Alisson

Sebuah proses kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh suatu negara tentu saja tidak dibuat dengan sembarangan oleh para pengambil kebijakan di negara tersebut. Kebijakan luar negeri keluar biasanya melalui proses analisis yang panjang dengan data dan fakta yang akurat. Kebijakan luar negeri juga tidak lepas dari kepentingan nasional, dimana suatu negara dalam memutuskan sebuah kebijakan luar negeri tentu memikirkan *feedback* untuk negaranya. Sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa kebijakan luar negeri yang di ambil oleh sebuah negara telah melalui proses kalkulasi untung dan rugi bagi negara tersebut.

Salah satu tokoh yang menganalisis proses kebijakan luar negeri yaitu Graham T. Alisson, dimana dalam jurnalnya yang berjudul *The American Political Science Review*

(*Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis*) (Allison, 1969, hal. 689-718) menyatakan bahwa :

“The assumption of rational behavior not just of intelligent behavior, but of behavior motivated by conscious calculation of advantages, calculation that in turn is based on an explicit and internally consistent value system.”

Dalam menganalisis suatu proses kebijakan luar negeri menurut Graham T. Allison dapat digunakan Model Kebijakan Rasional (*rational policy model*). Proses kebijakan itu sendiri secara teoritik sangat dipengaruhi oleh adanya faktor politik domestik dan eksternal internasional. Dalam perspektif “*Decision Making Process*”, Graham T Allison mengajukan tiga paradigma yang dapat digunakan untuk mempermudah menganalisis kebijakan luar negeri negara-negara di dunia, yaitu Model Aktor Rasional (MAR), Model Proses Organisasi (MPO), dan Model Politik Birokratik (MPB).

Model Aktor Rasional menekankan bahwa suatu proses pengambilan keputusan akan melewati tahapan penentuan tujuan, alternatif atau opsi, konsekuensi, dan pilihan keputusan. Model ini menyatakan bahwa keputusan yang dibuat merupakan suatu pilihan rasional yang telah didasarkan pada pertimbangan rasional intelektual dan kalkulasi untung rugi sehingga diyakini menghasilkan keputusan yang matang, tepat, dan prudent. Model ini dalam pengambilan kebijakannya lebih menekankan kepada peran pihak eksekutif, yaitu Presiden atau Kepala Pemerintahan dari suatu negara. Hal tersebut dikarenakan model Aktor Rasional ini biasanya digunakan pada saat masa krisis, sehingga membutuhkan keputusan sesegera mungkin dengan pertimbangan alternatif-alternatif yang ada. Keputusan yang diambil tentu saja keputusan dengan risiko terkecil dan keuntungan terbesar bagi negara tersebut.

ANALISA ALASAN-ALASAN PEMULIHAN HUBUNGAN BILATERAL TURKI DAN ISRAEL DI ERA PRESIDEN ERDOGAN TAHUN 2016

Turki dan Israel mengalami masa-masa buruk dalam hubungan bilateral diantara keduanya, yakni antara tahun 2010 hingga 2015. Namun pada akhir tahun 2016, Turki dan Israel sepakat untuk memulihkan hubungan bilateral kedua negara. Melalui peninjauan dan negosiasi akhirnya Erdogan menyepakati untuk memulihkan hubungan bilateral Turki dan Israel, keputusan untuk memulihkan hubungan tersebut tentu saja melalui mekanisme kalkulasi untung rugi oleh pemerintahan Turki di era Erdogan. Melalui kalkulasi untung rugi tersebut maka dapat dilihat

bahwa Turki bisa mendapatkan keuntungan lebih besar jika memulihkan hubungan dengan Israel. Pada BAB IV ini akan dibahas mengenai alasan-alasan Turki dalam memulihkan hubungan bilateral dengan Israel pada tahun 2016.

A. Keuntungan dalam Bidang Militer

Militer merupakan salah satu faktor penting bagi sebuah negara berdaulat, terutama dalam upayanya untuk menjaga keamanan masyarakatnya. Di era modern ini kekuatan militer suatu negara tidak lagi diukur hanya dari kuantitas jumlah pasukannya, tetapi lebih diperhitungkan dalam hal kecanggihan teknologi militer yang dimiliki oleh suatu negara. Untuk mengatasi kekurangan teknologi militer yang dimilikinya, maka sebuah negara dapat melakukan kerjasama militer atau membentuk aliansi dengan negara yang memiliki teknologi militer yang lebih mutakhir.

Israel merupakan negara dengan kekuatan militer dan memiliki teknologi militer yang canggih dikawasan Timur Tengah, sehingga tidak mengherankan apabila Turki mengadakan kerjasama dengan Israel dalam bidang keamanan dan kemiliteran. Hubungan kerjasama antara Turki dan Israel di bidang keamanan dan kemiliteran telah lebih dulu diintensifkan sejak tahun 1993. Kemudian data Institut Turki menyebutkan bahwa di bidang Pertahanan dan Keamanan, kedua negara juga memiliki perjanjian *Security and Confidentiality Pact* (Perjanjian Keamanan dan Kerahasiaan), ditandatangani pada tanggal 31 Mei 1994, dengan kesepakatan tersebut kedua negara sepakat untuk saling bertukar informasi dan dipastikan jaminan atas kerahasiaannya bagi pihak ketiga mana pun, latihan militer bersama serta produksi dan perdagangan senjata (Dhani, 2016).

Kemudian pada tahun 1996, Turki dan Israel kembali menyepakati sebuah perjanjian yaitu *Military Training Cooperation Agreement (MTCA)*, yaitu sebuah program kerjasama dalam bidang kemiliteran. Kerjasama tersebut mencakup protokol mengenai pertukaran perwira, kunjungan delegasi militer, pertukaran informasi, pelatihan militer tiga matra, serta pemberantasan terorisme dan penjagaan perbatasan (Eisenstadt M. , 1997). Pelaksanaan dari kerjasama MTCA yaitu latihan militer yang disebut *Reliant Mermaid*. Latihan tersebut bertujuan untuk melatih pasukan dalam misi penyelamatan

darurat dengan prosedur *Search and Rescue*. Diadakan pertama kali pada tahun 1998, yang kemudian mulai tahun 2000 dijadikan sebagai agenda tahunan.

Turki dan Israel ditahun yang sama kembali menyepakati perjanjian di bidang industri militer yang diberi nama *Defense Industry Cooperation Agreement (DICA)*. Dalam perjanjian tersebut, Turki dan Israel sepakat untuk saling menukar teknologi militer dan persenjataan. Pelaksanaan dari DICA yaitu Israel mendapatkan beberapa proyek kemiliteran Turki, diantaranya yaitu mempebaharui pesawat F-4 Phantom milik Turki dengan nilai 650 juta Dollar AS, pengadaan *Unnamed Combat Air Vehicles (UCAV)* untuk Turki senilai 76 juta Dollar AS, pembaharuan pesawat F-5 Turki dengan nilai kontrak 75 juta Dollar AS, pembaharuan Tank M60 Turki dengan nilai kontrak 600 juta Dollar AS (Kogan, 2006). Dua kerjasama tersebut saling menguntungkan bagi Turki maupun bagi Israel, dalam hal ini Turki mendapatkan kemudahan akses terhadap teknologi Israel dalam bidang industri pertahanan, sedangkan Israel mendapatkan akses wilayah Turki untuk melakukan latihan perang. Bahkan, Israel mendapatkan akses ke pangkalan udara militer Turki yang salah satunya adalah Konya Air Base. Dimana Konya Air Base merupakan pangkalan udara terbesar di wilayah Eropa dengan luas 38.183 km dan panjang landasan pacu utama 10.900 kaki (Global Security, 2011).

Surat Kabar Turki *Hürriyet*, menyebutkan bahwa pada tahun 2007 nilai kerjasama militer antara Turki dan Israel sudah mencapai angka 2,6 miliar Dollar AS dan 1,8 miliar Dollar AS, kerjasama tersebut antaranya berbentuk pertukaran teknologi dan perlengkapan militer. Saking dekatnya hubungan Turki dan Israel, Gregg Carlstrom seorang wartawan dari Al Jazeera bahkan mengatakan bahwa Turki adalah teman (negara) Islam paling dekat dengan Israel. Bahkan, sebelum terjadinya pembekuan hubungan, pilot-pilot Israel sudah biasa berlatih di teritori udara Turki (Dhani, 2016).

Ketika mengalami pembekuan hubungan antara Turki dan Israel pasca insiden Mavi Marmara, Turki mengalami kerugian tersendiri karena pembekuan hubungan tersebut terutama dalam bidang militer. Kerugian tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Turki kehilangan pemasok utama persenjataan dan teknologi-teknologi militer terbaru, karena seperti yang diketahui bahwa pada tahun 1996 Turki dan Israel

telah menandatangani perjanjian di bidang industri militer yang diberi nama *Defense Industry Cooperation Agreement (DICA)*, yang pada tahun 2007 nilai kerjasama tersebut sudah mencapai angka 2,6 miliar Dollar AS dan 1,8 miliar Dollar AS, namun harus terhenti karena pembekuan hubungan bilateral pada tahun 2010.

2. Selain persenjataan dan teknologi militer, Turki juga kehilangan salah satu *partner* dalam latihan militer. Seperti yang diketahui bahwa sejak tahun 1996, Turki dan Israel telah menandatangani sebuah perjanjian yaitu *Military Training Cooperation Agreement (MTCA)*, realisasi dari kerjasama tersebut yaitu *Reliant Mermaid*. Sebuah latihan bersama yang bertujuan untuk melatih pasukan dalam misi penyelamatan darurat dengan prosedur *Search and Rescue*. Diadakan pertama kali pada tahun 1998, yang kemudian mulai tahun 2000 dijadikan sebagai agenda tahunan. Namun harus dihentikan sejak tahun 2010.
3. Turki dan Israel dikawasan Timur Tengah sebenarnya memiliki nasib yang sama, yaitu etnis yang hidup dikepungan bangsa Arab. Turki merupakan etnis yang berasal dari ras Kaukasoid yang berasal dari kawasan Asia Tengah, sedangkan Israel merupakan etnis Yahudi yang kebanyakan merupakan kelahiran Eropa. Ditambah lagi dengan sejarah kelam keduanya dimasa lalu membuat mereka harus *survive* dalam kepungan negara-negara Arab. Sehingga dengan pembekuan hubungan tersebut Turki dan Israel harus berjalan sendiri-sendiri.

Pada tahun 2011 situasi dikawasan Timur Tengah memanas, karena bergejolaknya situasi domestik di beberapa negara yang mengalami *Arab Spring*, maka apapun kemungkinan bisa terjadi terhadap Turki yang juga berada dikawasan tersebut. Apalagi dengan adanya intervensi militer dari negara-negara *superpower* seperti Amerika Serikat dan Rusia di beberapa negara di kawasan Timur Tengah yang sedang mengalami konflik, hal tersebut menyebabkan keamanan negara-negara dikawasan Timur Tengah harus ditingkatkan.

Munculnya fenomena *Arab Spring* di kawasan Timur Tengah, terutama di negara-negara Arab yang dipimpin oleh seorang diktator dalam kurun waktu yang telah lama

menimbulkan dampak bagi kawasan tersebut. Dampak yang ditimbulkan dari fenomena tersebut tidak hanya dirasakan oleh dalam negeri dari negara yang bergejolak tersebut, namun dampaknya juga dirasakan oleh negara-negara disekitarnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa negara-negara disekitaran negara yang sedang mengalami fenomena *Arab Spring* juga memiliki kepentingan didalamnya, salah satunya yaitu Turki di konflik Suriah.

Keterlibatan Turki dalam pusaran konflik Suriah, dengan mendukung kelompok oposisi yang ingin menggulingkan Presiden Bashar Al Ashad menyebabkan secara tidak langsung Turki harus berhadapan dengan Rusia yang mendukung pemerintahan Presiden Bashar Al Ashad (Taufik, 2016). Konflik Suriah memang menjadi ajang *proxy war* antara Amerika Serikat bersama NATO yang mendukung oposisi berhadapan dengan Rusia yang pro terhadap Presiden Bashar Al Ashad. Sehingga Turki yang merupakan anggota NATO serta teritorialnya berbatasan langsung dengan Suriah, menyebabkan Turki rawan terhadap kontak langsung dengan Rusia.

Hal yang dikhawatirkan akhirnya terjadi, pada tanggal 24 November 2015 dua pesawat tempur Turki F-16 menembak jatuh pesawat tempur Rusia Su-24 karena dianggap melintasi wilayah Turki tanpa izin (KOMPAS, 2015). Peristiwa tersebut menyebabkan kemarahan dari pihak Rusia, bahkan Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa:

“Peristiwa ini di luar kerangka perlawanan yang biasa terhadap terorisme. Tentu saja, tentara kami sedang melancarkan perang heroik melawan teror, dengan mengorbankan nyawa mereka. Tetapi jatuhnya korban hari ini karena tikaman dari belakang oleh pendukung teroris. Tidak ada cara lain untuk menggambarkan apa yang terjadi hari ini” (Armandhanu, 2015).

Namun disisi lain Presiden Erdogan menolak untuk disalahkan dan menolak untuk meminta maaf kepada pihak Rusia atas insiden tersebut. Presiden Erdogan menyatakan bahwa :

"Alasan penembakan tersebut sederhana, demi mempertahankan keamanan dan hak saudara kami di Suriah. Kami hanya ingin mempertahankan keamanan dan

hak-hak saudara kami. Kami akan melanjutkan misi kemanusiaan di wilayah perbatasan Suriah" (TEMPO, 2015).

Turki juga mengirimkan surat yang disampaikan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menyatakan jet perang Rusia itu ditembak jatuh di wilayah udaranya. Jet tersebut telah memasuki wilayah Turki sepanjang 1 mil selama lebih dari 17 detik, meskipun sudah diperingatkan sebanyak sepuluh kali agar mengubah arah penerbangannya.

Hal tersebut menyebabkan ketegangan hubungan antara Turki dan Rusia, puncaknya adalah ketika Rusia memutuskan untuk mengusir Duta Besar Turki untuk Rusia dan warga negara Turki yang ada di Rusia. Ketegangan hubungan ini dapat mengancam keamanan nasional Turki, karena militer Rusia yang sedang beroperasi di Suriah bisa saja sewaktu-waktu melakukan penyerangan terhadap wilayah Turki. Ditambah lagi dengan kekuatan militer Rusia yang berada diatas Turki, menyebabkan Turki harus siap siaga untuk menghadapi kemungkinan terburuk dari ketegangannya dengan Rusia.

Salah satu langkah yang diambil oleh Presiden Erdogan untuk kesiapan Turki adalah dengan mencari aliansi militer, pilihan rasional yang diambil oleh Presiden Erdogan ialah dengan memulihkan hubungan bilateral dengan Israel. Di kawasan Timur Tengah kekuatan militer Israel merupakan salah satu yang terkuat, ditambah lagi dengan senjata nuklir yang mereka miliki maka posisi Israel sangat disegani. Selain itu, Israel juga tidak melibatkan diri dalam konflik Suriah menjadikannya sebagai aliansi militer yang ideal bagi Turki.

Dari data yang dikeluarkan oleh *Business Insider* tahun 2014 Israel menempati posisi ke-2 dengan militer terkuat di kawasan Timur Tengah persis dibawah Turki yang menempati urutan ke-1 (Bender & Gould, 2014). Namun, hal yang membedakan yakni kekuatan militer Israel tersebut juga disokong dengan kekuatan senjata pemusnah masal (nuklir) yang dimiliki oleh Israel. Menurut data tersebut Israel memiliki senjata nuklir sebanyak 80-200 dan Israel merupakan satu-satunya negara di kawasan Timur Tengah yang memiliki senjata nuklir.

Dengan kekuatan dan kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh militer Israel, hal tersebut akan menjadi keuntungan tersendiri bagi Turki ketika memutuskan untuk memulihkan hubungan bilateral dengan Israel. Sehingga aliansi militer Turki dan Israel akan sangat menguntungkan bagi kedua negara. Hal tersebut tegaskan oleh Presiden Erdogan dalam naskah pidato tertulis disurat kabar Turki Kantor Berita AFP, seperti yang dilansir dari merdeka.com:

“Israel membutuhkan negara seperti Turki di kawasan, dan kami pun harus mengakui bahwa Bangsa Turki membutuhkan Israel. Inilah kenyataannya. Jika bisa dicapai langkah yang saling menguntungkan, maka normalisasi bilateral akan mengikuti secara alamiah” (Mohamad, 2016).

Sehingga dari fakta yang ada, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan Turki terhadap persenjataan dan teknologi militer Israel, aliansi militer dengan Israel, serta ketegangan antara Turki dan Rusia menjadi faktor pendorong dari terjadinya pemulihan hubungan bilateral Turki dan Israel. Keuntungan dari segi militer ini tentu saja menjadi pertimbangan rasional bagi Presiden Erdogan dalam membuat kebijakan untuk memulihkan hubungan dengan Israel, karena sebagai aktor rasional kalkulasi untung rugi merupakan suatu hal yang mutlak untuk mencapai kepentingan nasional negaranya.

B. Keuntungan dalam Bidang Politik

Uni Eropa sendiri merupakan sebuah organisasi internasional antar negara-negara Eropa yang berfokus pada ekonomi, politik, dan sosial. Uni Eropa dibentuk pada tahun 1958, namun baru diresmikan pada tahun 1992 di Maastricht, Belanda. Hingga saat ini Uni Eropa telah memiliki anggota sebanyak 28 negara (European Union, 2015). Uni Eropa juga dikenal sebagai organisasi regional yang paling berhasil dalam mengintegrasikan negara-negara anggotanya, contohnya seperti penyatuan mata uang menjadi Euro yang berlaku diseluruh negara anggota Uni Eropa, selain itu juga diberlakukannya visa Schengen diseluruh wilayah negara anggota Uni Eropa sehingga lebih memudahkan dalam berpidah tempat dari satu negara ke negara lainnya. Selain itu, masih ada lagi keuntungan yang didapat oleh negara anggota misalnya dalam bidang perdagangan seperti bebas biaya ekspor ke sesama negara anggota.

Turki memendam hasrat yang besar untuk bergabung ke dalam organisasi negara-negara Eropa yakni Uni Eropa, iming-iming keuntungan dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan juga keamanan menyebabkan banyak negara Eropa yang ingin menjadi anggota Eropa. Turki sendiri telah mendaftarkan keanggotaan di Uni Eropa dari tahun 1987 namun hingga saat ini hal tersebut belum terealisasi (Alfian, 2015, hal. 140). Terdapat banyak kendala yang harus dihadapi Turki dalam upayanya ini, hal tersebut diantaranya yaitu konflik Turki dan Yunani di Siprus dan tuduhan genosida oleh Turki pada masa Perang Dunia I di Armenia (Taghian, 2012, hal. 393).

Meskipun demikian, hal tersebut tidak membuat Turki surut hasratnya untuk menjadi anggota penuh di Uni Eropa. Keanggotaan Turki di Uni Eropa akan membantu Presiden Erdogan dalam merealisasikan cita-cita besar *neo-ottomanism*, yakni ingin mengembalikan kejayaan Turki seperti dimasa kekhalifahan Turki Utsmani meskipun dalam bentuk lain. Dengan menjadi anggota Uni Eropa, maka akan mempermudah Presiden Erdogan untuk menyuarakan perjuangan terhadap Islam yang selama ini mendapat stigma negatif di Eropa.

Keanggotaan Turki di Uni Eropa juga dapat menjadi jalan bagi Presiden Erdogan untuk memajukan perekonomian Turki, karena dengan segala kemudahan yang ditawarkan oleh Uni Eropa bagi negara-negara anggotanya akan berdampak pada kemajuan ekonomi di negara-negara anggotanya. Hal tersebutlah yang menyebabkan Turki tidak kehilangan hasrat untuk menjadi anggota Uni Eropa meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi.

Pada 3 Oktober 2005, Turki dan Uni Eropa mencapai kesepakatan dan memulai pembicaraan mengenai penerimaan anggota baru Uni Eropa. Pertemuan ini berlangsung di Luxembourg dan dihadiri oleh pimpinan dari 25 negara anggota Uni Eropa dan Menteri Luar Negeri Turki Abdullah Gul (KOMPAS, 2005). Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah resolusi tak terbatas yang mensyaratkan Turki untuk menandatangani *Adoption Protocol* yang memperluas keberadaan *Association Agreement* dengan Uni Eropa terhadap seluruh negara anggota Uni Eropa (Sumantri, 2012, hal. 98). Tahap pertama sebagai tindak lanjut dari hasil perundingan 3 Oktober 2005 yakni segera dimulainya proses *screening* terhadap Turki. Kemudian pertemuan selanjutnya membahas

terkait *screening* tersebut selesai pada Oktober 2006. Berdasarkan hasil *screening* itulah kemudian Komisi Eropa mempersiapkan laporan pemeriksaan (*screening reports*) untuk tiap bab negosiasi (Delegation of the European Union to Turkey, 2006).

Dalam kebijakan perluasan keanggotaan Uni Eropa dengan negara-negara yang saat ini mengajukan permohonan ke Uni Eropa. Ada *conditions for membership* yang ketat untuk memastikan bahwa negara calon anggota nantinya mampu memenuhi kewajiban sebagai negara anggota Uni Eropa. Termasuk untuk memenuhi semua standar dan peraturan di dalam Uni Eropa. Hal itu untuk tujuan proses akses negosiasi yang terdiri dari 130.000 halaman yang dikelompokkan dalam 35 bidang kebijakan yang berbeda.

Hingga tahun 2010, Turki telah menyelesaikan 16 bab negosiasi dari total 35 bab negosiasi. Satu bab dari 16 bab negosiasi ditutup sementara waktu (European Commission , 2015). Sikap Uni Eropa yang kerap menanggukkan beberapa bab dari persyaratan negosiasi dengan Turki dan keputusan beberapa negara anggota Uni Eropa khususnya oposisi seperti Prancis dan Jerman yang menutup tawaran untuk keanggotaan Turki (Sumantri, 2012, hal. 123). Hal itu senada dengan yang disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris David Cameron dalam kunjungannya ke Turki pada 2010 yang menjelaskan bahwa Turki dianggap tidak mungkin bergabung dalam sepuluh tahun ke depan, karena adanya sebagian kelompok-kelompok mengoposisikan diri contohnya seperti Prancis, Jerman, dan Italia.

Kemudian Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi menegaskan bahwa oposisi yang ditunjukkan oleh beberapa negara-negara anggota Uni Eropa, di mana negara-negara tersebut merupakan negara-negara penting di Uni Eropa. (Euro News, 2008). Sikap oposisi ataupun penolakan dari Prancis, Jerman, dan Italia terhadap upaya Turki dalam memenuhi syarat sebagai anggota Uni Eropa tidak lepas dari pembekuan hubungan Turki terhadap Israel tahun 2010, karena Prancis, Jerman, dan Italia merupakan mitra dari Israel.

Pembekuan hubungan yang dilakukan oleh Turki terhadap Israel pada tahun 2010, menjadi penghambat untuk diterimanya Turki menjadi anggota tetap Uni Eropa, karena

ada dua hal yang akan menjadi pertimbangan Uni Eropa terkait kasus ini, yaitu, *pertama*, adanya hubungan kurang baik dengan negara tetangga atau sekitar kawasan dalam hal ini Israel. Berdasarkan prinsip Kantian seharusnya negara calon anggota Uni Eropa harus memiliki hubungan baik, hubungan baik tersebut harus mencakup internal maupun dengan eksternal serta komitmen atas multilateralisme, dalam hal ini menurut Uni Eropa Turki dinilai belum memenuhinya (LaGro & Jorgense, 2007, hal. 68).

Kedua, Israel adalah mitra baik dari negara-negara anggota Uni Eropa. Desember 2015 lalu, Israel telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Yunani, Italia, dan Siprus atas pembentukan “segitiga energi”, yakni sebuah pipa gas bawah laut bersama sepanjang 2.100 km, untuk mengirimkan gas alam dari Israel menuju ke jantung Eropa. Bagi Italia, Yunani, dan Siprus sebagai tiga negara yang mengalami kelesuan ekonomi tentu saja penemuan gas alam Israel dan kemitraan berikutnya dengan Israel itu menjanjikan untuk memperingan situasi ekonomi mereka (Rudick, 2016).

Uni Eropa melihat Israel sebagai arena untuk menjadi kekuatan dunia dalam diplomasi yang lebih relevan, sedangkan Israel melihat Uni Eropa sebagai pasar yang dekat dan besar untuk produk negaranya. Pada tahun-tahun belakangan ini, Uni Eropa telah menyaksikan bagaimana Israel bukan hanya sebagai raksasa ekonomi baru karena terdorong oleh inovasinya, tetapi juga merupakan penghasil energi yang tidak terpisahkan dengan jalur energi Eropa. Sehingga Israel menjadi negara yang sangat penting bagi Uni Eropa. Sehingga dengan pembekuan hubungan oleh Turki terhadap Israel yang notabene merupakan mitra baik negara-negara Eropa tentu akan semakin meningkatkan stigma negatif mereka terhadap Turki.

Setelah adanya pembicaraan damai antara Turki dan Israel yang membicarakan rencana pemulihan hubungan pada tahun 2015 dan kemudian resmi memulihkan hubungan pada tahun 2016 membuat Uni Eropa mulai mengurangi stigma negatif terhadap Turki, sehingga Turki dan Uni Eropa sepakat untuk membuka pembicaraan baru terkait upaya Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa. Uni Eropa juga mulai melibatkan Turki dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami Uni Eropa, misalnya dengan dilibatkannya Turki dalam menangani masalah pengungsi dari Suriah, negosiasi Turki dan Uni Eropa terus bergerak maju dan Presiden Turki diundang untuk KTT Uni Eropa.

Akhirnya, Turki memberikan tuntutannya yang paling penting, yakni pengajuan bebas visa perjalanan ke Eropa, secepatnya pada awal Oktober 2016 (Wesel, 2016). Berikut merupakan butir-butir kesepakatan antara Turki dan Uni Eropa :

- 1) Semua migran tak berdokumen resmi yang menyeberang dari Turki ke Yunani mulai 20 Maret 2016 akan dikirim kembali ke Turki. Setiap migran yang datang akan ditinjau secara menyeluruh oleh aparat Yunani.
- 2) Untuk setiap migran asal Suriah yang dikembalikan ke Turki, migran Suriah yang telah berada di Turki akan dikirim ke Uni Eropa. Prioritas akan diberikan bagi mereka yang belum mencoba masuk Uni Eropa secara ilegal dan jumlahnya dibatasi hingga 72.000 orang.
- 3) Warga Turki akan diberikan visa Schengen yang berlaku di semua negara anggota Uni Eropa mulai Juni 2016.
- 4) Uni Eropa akan mempercepat dana bantuan sebesar 3 Milliar Euro (Rp44,2 Triliun) ke Turki untuk menolong para migran.
- 5) Baik Uni Eropa maupun Turki sepakat menyegarkan kembali permintaan Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa. Perundingan akan dimulai pada Juli 2016 (BBC News, 2016).

C. Keuntungan dalam Bidang Ekonomi

Turki dan Israel telah memiliki kerjasama dibidang ekonomi sejak tahun 1996, pada kesempatan tersebut Turki dan Israel menandatangani perjanjian kebebasan ekonomi bilateral. Kerjasama ini juga merupakan kelanjutan dari Pakta Periferal yang ditandatangani pada tahun 1958, Pakta Periferal ini berisi antara lain yaitu kedua negara sepakat untuk saling bertukar informasi intelijen dan kampanye kehumasan ke dalam komunitas dan rakyat masing-masing (Santosa, 2017). Kemudian pada tahun 1997, Turki dan Israel kembali membuat kerjasama yang mempermudah perdagangan antar kedua negara, yaitu perjanjian pencegahan pajak berganda. Hubungan ini terus berlanjut dan kemudian berkembang pada kerjasama bidang investasi pada tahun 1998.

Pada Mei 2004, Menteri Pembangunan Israel Yusuf Paritski mengunjungi Turki. Dalam kunjungan tersebut berhasil ditandatangani sebuah kesepakatan kerjasama antara kedua negara bernilai 800 juta Dollar AS, dalam perjanjian tersebut Turki berkomitmen

untuk membangun tiga pusat pembangkit listrik baru di Israel yang bertujuan untuk meningkatkan perindustrian di Israel. Selain itu, kedua negara juga menandatangani sebuah kesepakatan bahwa Turki akan mengekspor 50 juta kubik air Turki setiap tahunnya ke Israel selama 20 tahun kedepan (Taghian, 2012, hal. 455). Selain dari perdagangan, kerjasama antara Turki dan Israel yang saling menguntungkan adalah dalam pariwisata. Sebelum terjadinya pembekuan hubungan antara Turki dan Israel, berdasarkan Badan Urusan Pariwisata Israel pada periode 2008-2009, tercatat bahwa warga Israel yang pergi berkunjung ke Turki mencapai angka 560.000 orang (Dhani, 2016).

Namun akibat dari pembekuan hubungan dari Turki terhadap Israel berdampak pada penurunan kerjasama ekonomi. Penurunan kerjasama ekonomi antara kedua negara terbukti dari data statistik yang dirilis oleh TurkStat, yakni terjadi pada sektor perdagangan, investasi, dan pariwisata. Di sektor perdagangan misalnya, meskipun pasca insiden Mavi Marmara 2010 angka perdagangan kedua negara tidak terdampak secara langsung, namun volume perdagangan luar negeri Turki dan Israel sempat mengalami penurunan pada tahun 2012. Hal ini dikarenakan sikap kritis Turki terhadap Israel terus berlanjut sehingga menyebabkan eskalasi tensi hubungan kedua negara. Akibatnya, volume perdagangan kedua negara menurun hingga 400 juta dolar AS dalam kurun satu tahun, yakni dari 4,44 milyar dolar AS pada tahun 2011 menjadi 4,03 milyar dolar AS pada tahun 2012, yang mana penurunan angka ini mayoritas terjadi di sektor industri bahan-bahan kimia (Turkish Statistic Institute, 2017).

Di sektor investasi, nilai investasi Israel di Turki menurun drastis dari 997 juta dolar AS pada tahun 2010 menjadi hanya sebesar 427 juta dolar AS pada tahun 2011. Penurunan investasi Israel tersebut antara lain terjadi di sektor pertambangan minyak sebesar 13% dan sektor perbankan sebesar 11% (Bryant & Peker, 2011). Menashe Carmon, ketua *Turkish-Israeli Business Council*, mengatakan bahwa krisis hubungan diplomatik Turki dan Israel menyebabkan para investor Israel berpikir ulang atau bahkan menunda keputusan untuk berinvestasi dan mendirikan usaha bersama jangka panjang di Turki (Setrakian, 2011).

Selain itu, investasi Turki di Israel juga terdampak karena masalah ini, misalnya, *Zorlu Group* yang mengurangi aktivitas dan operasi dalam proyek gas alam di Israel karena tekanan dan sensitivitas masyarakat sipil, kemudian *Yilmazlar Construction Group*, perusahaan Turki yang bergerak dalam bidang konstruksi di Israel sejak tahun 1993 dan telah mempekerjakan 700 tenaga kerja Israel, mengklaim bahwa aset-aset perusahaan sebesar jutaan dolar AS dibekukan oleh pengadilan Israel sebagai dampak dari tensi politik kedua negara (Cagaptay & Evans, 2012).

Di sektor pariwisata, industri pariwisata menjadi sektor yang paling terdampak karena pembekuan hubungan ini. Setelah insiden Mavi Marmara tahun 2010, Kementerian Luar Negeri Israel mengumumkan *travel warning* yang mengakibatkan jumlah wisatawan Israel yang berkunjung ke Turki semakin berkurang, yakni dari 110.322 wisatawan pada tahun 2010 menjadi 79.420 wisatawan pada tahun 2011. Kunjungan wisatawan Israel ke Turki yang berkurang pun berdampak pada penurunan pendapatan wisata yang diperoleh Turki dari wisatawan Israel, yakni dari 120 juta dolar AS pada tahun 2009 menjadi hanya 61 juta dolar AS pada tahun 2011 (Turkish Statistic Institute, 2017).

Konflik antara Turki dan Israel akibat insiden Mavi Marmara yang berujung pada pembekuan hubungan, sebenarnya sangat merugikan kedua negara dalam bidang ekonomi. Karena bagaimana pun, Turki dan Israel merupakan dua negara yang saling membutuhkan di kawasan Timur Tengah. Sehingga pemulihan hubungan bilateral akan berdampak baik bagi ekonomi kedua negara, dengan adanya pemulihan hubungan kedua negara akan semakin mudah dalam menjalankan kerjasama ekonomi. Terbukti bahwa Israel merupakan mitra perdagangan yang menguntungkan bagi Turki, hal tersebut dibuktikan dari data *Turkish Statistical Institute* berikut yang menunjukkan bahwa Israel merupakan negara nomor 6 sebagai tujuan ekspor Turki.

Pemulihan hubungan ini dapat merubah persepsi dunia internasional dalam bidang ekonomi, kesepakatan antara Turki dan Israel dapat membantu menghilangkan pesimisme investor dan memicu keberpihakan investor pada Turki, dimana kebijakan luar negeri mencerminkan realitas ekonomi Turki. Setelah pemulihan hubungan, kedua negara langsung melakukan peninjauan kerjasama di bidang energi. Peninjauan itu salah

satunya dilakukan dengan kunjungan kerja Menteri Infrastruktur, Energi, dan Sumber Daya Air Israel, Yuval Steinitz ke Turki pada 13 Oktober 2016 untuk bertemu dengan Menteri Bidang Energi Turki. Selain pertemuan itu, kedua menteri juga bertemu di sela-sela penyelenggaraan Kongres Energi Dunia ke-23 di Istanbul (KOMPAS, 2016).

Dari data dan fakta tersebut dapat disimpulkan, bahwa dengan kondisi perpolitikan yang tidak menentu karena pembekuan hubungan bilateral oleh Turki terhadap Israel karena insiden Mavi Marmara mengganggu kondusifitas kerjasama ekonomi kedua negara. Dengan adanya pemulihan hubungan tentu saja dalam hubungan ekonomi tidak akan ada hambatan dan lebih kondusif, sehingga secara ekonomi pemulihan hubungan ini akan menguntungkan bagi kedua negara.

Kesimpulan

Presiden Erdogan memutuskan untuk memulihkan hubungan dengan Israel karena ketika mengalami pembekuan hubungan antara Turki dan Israel pasca insiden Mavi Marmara, Turki mengalami kerugian tersendiri dibidang militer, politik dan ekonomi. Kerugian dalam bidang militer antara lain, *pertama*, Turki kehilangan pemasok utama persenjataan dan teknologi-teknologi militer terbaru, karena seperti yang diketahui bahwa pada tahun 1996 Turki dan Israel telah menyepakati perjanjian di bidang industri militer yang diberi nama *Defense Industry Cooperation Agreement (DICA)*, yang pada tahun 2007 nilai kerjasama tersebut sudah mencapai angka 2,6 miliar Dollar AS dan 1,8 miliar Dollar AS, namun harus terhenti karena pembekuan hubungan bilateral pada tahun 2010. *Kedua*, Turki juga kehilangan salah satu *partner* dalam latihan militer. Seperti yang diketahui bahwa sejak tahun 1996, Turki dan Israel telah menyepakati sebuah perjanjian yaitu *Military Training Cooperation Agreement (MTCA)*, realisasi dari kerjasama tersebut yaitu *Reliant Mermaid*. Sebuah latihan bersama yang bertujuan untuk melatih pasukan dalam misi penyelamatan darurat dengan prosedur *Search and Rescue*. Diadakan pertama kali pada tahun 1998, yang kemudian mulai tahun 2000 dijadikan sebagai agenda tahunan. Namun harus dihentikan sejak tahun 2010. *Ketiga*, Turki dan Israel dikawasan Timur Tengah sebenarnya memiliki nasib yang sama, yaitu etnis yang hidup dikepungan bangsa Arab. Turki merupakan etnis yang berasal dari ras Kaukasoid yang berasal dari kawasan Asia Tengah, sedangkan Israel merupakan etnis Yahudi yang

kebanyakan merupakan kelahiran Eropa. Ditambah lagi dengan sejarah kelam keduanya dimasa lalu membuat mereka harus *survive* dalam kepungan negara-negara Arab. Sehingga dengan pembekuan hubungan tersebut Turki dan Israel harus berjalan sendiri-sendiri.

Dalam bidang politik terutama dalam upaya Turki untuk menjadi anggota tetap Uni Eropa juga mengalami kerugian tersendiri, sikap Uni Eropa yang kerap menangguhkan beberapa bab dari persyaratan negosiasi dengan Turki dan keputusan beberapa negara anggota Uni Eropa khususnya oposisi seperti Prancis, Italia dan Jerman (negara-negara mitra Israel) yang menutup tawaran untuk keanggotaan Turki karena ada dua hal yang akan menjadi pertimbangan Uni Eropa terkait kasus ini, yaitu, *pertama*, adanya hubungan kurang baik dengan negara tetangga atau sekitar kawasan dalam hal ini Israel. Berdasarkan prinsip Kantian seharusnya negara calon anggota Uni Eropa harus memiliki hubungan baik, hubungan baik tersebut harus mencakup internal maupun dengan eksternal serta komitmen atas multilateralisme, dalam hal ini menurut Uni Eropa Turki dinilai belum memenuhinya. *Kedua*, Israel adalah mitra baik dari negara-negara anggota Uni Eropa. Uni Eropa melihat Israel sebagai arena untuk menjadi kekuatan dunia dalam diplomasi yang lebih relevan, sedangkan Israel melihat Uni Eropa sebagai pasar yang dekat dan besar untuk produk negaranya. Pada tahun-tahun belakangan ini, Uni Eropa telah menyaksikan bagaimana Israel bukan hanya sebagai raksasa ekonomi baru karena terdorong oleh inovasinya, tetapi juga merupakan penghasil energi yang tidak terpisahkan dengan jalur energi Eropa. Sehingga dengan pembekuan hubungan oleh Turki terhadap Israel yang notabene merupakan mitra baik negara-negara Eropa tentu akan semakin meningkatkan stigma negatif Uni Eropa terhadap Turki.

Kerugian juga terjadi dibidang ekonomi, disektor perdagangan misalnya, meskipun pasca insiden Mavi Marmara 2010 angka perdagangan kedua negara tidak terdampak secara langsung, namun volume perdagangan luar negeri Turki dan Israel sempat mengalami penurunan pada tahun 2012. Disektor investasi Turki di Israel juga terdampak karena masalah ini, misalnya, *Zorlu Group* yang mengurangi aktivitas dan operasi dalam proyek gas alam di Israel karena tekanan dan sensitivitas masyarakat sipil, kemudian *Yilmazlar Construction Group*, perusahaan Turki yang bergerak dalam bidang

konstruksi di Israel sejak tahun 1993 dan telah mempekerjakan 700 tenaga kerja Israel, mengklaim bahwa aset-aset perusahaan sebesar jutaan dolar AS dibekukan oleh pengadilan Israel sebagai dampak dari tensi politik kedua negara. industri pariwisata menjadi sektor yang paling terdampak karena pembekuan hubungan ini. Disektor pariwisata setelah insiden Mavi Marmara tahun 2010, Kementerian Luar Negeri Israel mengumumkan *travel warning* yang mengakibatkan jumlah wisatawan Israel yang berkunjung ke Turki semakin berkurang, yakni dari 110.322 wisatawan pada tahun 2010 menjadi 79.420 wisatawan pada tahun 2011.

Daftar Pustaka

- Alfian, M. A. (2015). *Militer dan Politik di Turki*. Bekasi: PT PENJURU ILMU SEJATI.
- Allison, G. T. (1969). Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis. *The American Political Science Review*, 689-718.
- Amalsyah, A. (2014). *Adelete Ve Kalkinma Partisi (AKP) vs Kemalis Strategi AKP Mengubah Arah Kebijakan Politik di Turki*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Armandhanu, D. (2015, November 25). *Putin Marah Besar Pesawat Tempurnya Ditembak Jatuh Turki*. Dipetik Mei 16, 2018, dari www.cnnindonesia.com:
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20151125074856-134-93849/putin-marah-besar-pesawat-tempurnya-ditembak-jatuh-turki>
- BBC News. (2016, Maret 20). *Kesepakatan Uni Eropa dan Turki soal migran resmi berlaku*. Diambil kembali dari www.bbc.com:
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/03/160320_dunia_turki_unieropa_migran
- Bender, J., & Gould, S. (2014, Desember 12). *The 15 Most Powerful Militaries In The Middle East*. Retrieved Mei 16, 2018, from www.businessinsider.com: <http://www.businessinsider.com/15-most-powerful-middle-east-militaries-2014-12/?IR=T>
- Bryant, S., & Peker, E. (2011, September 22). *Turkey-Israel Booming Trade Obscured in Erdogan Political Rants*. Diambil kembali dari www.bloomberg.com:
<http://www.bloomberg.com/news/articles/2011-09-22/turkey-israel-business-boom-obscured-in-erdogan-rant-against-trade-partner>
- Cagaptay, S., & Evans, T. (2012). The Unexpected Vitality of Turkish-Israeli Trade. *The Washington Institute for Near East Policy, No.16*, 1-8.
- Delegation of the European Union to Turkey. (2006). *EU and Turkey- Current*. Diambil kembali dari www.avrupa.eu: <https://www.avrupa.info.tr/en/eu-and-turkey/accession-negotiations/what-is-the-current-status.html>
- Dhani, A. (2016, Juli 22). *Benci Tapi Rindu Israel - Turki*. Dipetik Mei 20, 2018, dari www.tirto.id:
<https://tirto.id/benci-tapi-rindu-israel--turki-buKi>
- Eisenstadt, M. (1997, Juli 24). *Turkish-Israeli Military Cooperation*. Dipetik Mei 22, 2018, dari www.washingtoninstitute.org: <http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/turkish-israeli-military-cooperation-an-assessment>

- European Commission . (2015). *European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations*. Diambil kembali dari www.europa.eu: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/detailed-country-information/turkey_en
- Global Security. (2011, November 7). *Konya Air Base, Turkey* . Dipetik Mei 22, 2018, dari www.globalsecurity.org: <https://www.globalsecurity.org/military/world/europe/konya.htm>
- Hutapea, R. U. (2016, November 16). *Normalisasi Hubungan, Israel Tunjuk Dubes Baru Untuk Turki*. Dipetik Maret 30, 2018, dari www.detik.com: <https://news.detik.com/internasional/d-3346755/normalisasi-hubungan-israel-tunjuk-dubes-baru-untuk-turki>
- Kogan, E. (2006). Cooperation in the Turkish-Israel Defense Industry. *Conflict Studies Research Centre*, 3.
- KOMPAS. (2005, Maret 17). Siprus Ancam Veto Kesepakatan UE-Turki. *Internasional*, 9.
- KOMPAS. (2015, November 25). *Turki Tembak Jatuh Jet Rusia, NATO Gelar Rapat Luar Biasa*. Dipetik Mei 16, 2018, dari www.kompas.com: <https://internasional.kompas.com/read/2015/11/24/20144771/Turki.Tembak.Jatuh.Jet.Rusia.NATO.Gelar.Rapat.Luar.Biasa>
- KOMPAS. (2016, Oktober 11). *Turki dan Israel Jajaki Kerja Sama di Bidang Energi*. Diambil kembali dari www.kompas.com: <https://internasional.kompas.com/read/2016/10/11/12343581/turki.dan.israel.jajaki.kerja.sama.di.bidang.energi>
- KOMPAS. (2016, Juni 27). *Turki dan Israel Sepakat Pulihkan Hubungan Bilateral*. Dipetik Februari 15, 2018, dari www.kompas.com: <https://internasional.kompas.com/read/2016/06/27/15021881/turki.dan.israel.sepakat.pulihkan.hubungan.bilateral>
- LaGro, E., & Jorgense, K. E. (2007). *Turkey and the European Union Prospect for Difficult Encounter*. UK: Palgrave Macmillan.
- Marzaman, A. P. (2011). *Reccep Tayyib Erdogan: Turk, Islam, dan Uni Eropa*. Jakarta: HEPTAcentrum Press.
- Mohamad, A. (2016, Januari 3). *Erdogan : Turki-Israel saling membutuhkan*. Dipetik Februari 5, 2018, dari www.merdeka.com: <https://m.merdeka.com/dunia/erdogan-turki-israel-saling-membutuhkan.html>
- Mughni, S. A. (1997). *Sejarah Kebudayaan Islam di Kawasan Turki*. Jakarta: Logos.
- Nasution, R. (2016, Maret 31). *Indonesia Juga Bagian Dari Melanesia*. Dipetik Februari 26, 2018, dari www.antaranews.com: <https://www.antaranews.com/berita/552798/indonesia-juga-bagian-dari-negara-melanesia>

- Rudick, Y. (2016, Mei 12). *THE FUTURE OF EU-ISRAEL RELATIONS*. Dipetik Mei 20, 2018, dari [www.jpost.com](https://www.jpost.com/Opinion/The-future-of-EU-Israel-relations-556232): <https://www.jpost.com/Opinion/The-future-of-EU-Israel-relations-556232>
- Santosa, E. (2017, Juli 27). *Turki-Israel Keras di Luar, Mesra di Dalam*. Dipetik Mei 20, 2018, dari [kumparan.com](https://kumparan.com/@kumparannews/turki-israel-keras-di-luar-mesra-di-dalam): <https://kumparan.com/@kumparannews/turki-israel-keras-di-luar-mesra-di-dalam>
- Sari, A. P. (2015, Januari 15). *Menlu Israel : Presiden Turki Anti - Yahudi*. Dipetik Maret 30, 2018, dari [www.cnnindonesia.com](https://m.cnnindonesia.com/internasional/20150115140019-134-2481/menlu-israel-presiden-turki-anti-yahudi): <https://m.cnnindonesia.com/internasional/20150115140019-134-2481/menlu-israel-presiden-turki-anti-yahudi>
- Setrakian, L. (2011, September 3). *Did Turkey Turn On Israel to Boost Business from the Arab World?* Diambil kembali dari [www.businessinsider.com](http://www.businessinsider.com/did-turkey-turn-on-israel-to-boost-business-from-the-arab-world-2011-9?IR=T&r=US&IR=T): <http://www.businessinsider.com/did-turkey-turn-on-israel-to-boost-business-from-the-arab-world-2011-9?IR=T&r=US&IR=T>
- Sumantri, T. S. (2012). *Demokratisasi Turki: Hubungan Sipil-Militer Tahun 2003-2011*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Taghian, S. (2012). *ERDOGAN Muadzin Istanbul Penakluk Sekularisme Turki*. Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR.
- Taufik, A. (2016, September 08). *Rusia Meradang Setelah AS Dukung Turki Ikut Perang Suriah*. Dipetik Mei 16, 2018, dari www.okezone.com: <https://news.okezone.com/read/2016/09/08/18/1484382/rusia-meradang-setelah-as-dukung-turki-ikut-perang-suriah>
- TEMPO. (2015, November 25). *Penjelasan Erdogan, Mengapa Turki Tembak Jatuh Jet Rusia*. Dipetik Mei 16, 2018, dari www.tempo.co: <https://dunia.tempo.co/read/722195/penjelasan-erdogan-mengapa-turki-tembak-jatuh-jet-rusia>
- TEMPO. (2016, Mei 03). *Selandia Baru Blokir Aksi Opisisi Dukung Referendum Papua*. Dipetik April 20, 2018, dari www.tempo.co: <https://dunia.tempo.co/read/768157/selandia-baru-blokir-aksi-opisisi-dukung-referendum-papua>
- Turkish Statistic Institute. (2017). *Foreign Trade Statistics*. Dipetik Mei 20, 2018, dari www.turkstat.gov.tr: http://www.turkstat.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046
- VOA INDONESIA. (2007, Juli 30). *Hasil Akhir Pemilu Turki : Partai PM Erdogan Menangkan 341 dari 550 Kursi Parlemen*. Dipetik Februari 5, 2018, dari www.voaindonesia.com: <https://www.voaindonesia.com/a/10041.html>
- Wesel, B. (2016, Maret 7). *Turki: Kunci Uni Eropa Atasi Krisis Pengungsi*. Diambil kembali dari www.dw.com: <http://www.dw.com/id/turki-kunci-uni-eropa-atasi-krisis-pengungsi/a-19098512>